

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan *Fraud* LPD di Kabupaten Tabanan

Kadek Ayu Kartika Dewi ^{1*}, I Putu Budi Anggiriawan ², Ni Putu Riski Martini ³

^{1*,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Indonesia.

Corresponding Email: budianggiriawan@gmail.com ²

Abstrak. *Fraud merupakan permasalahan serius yang dapat menghambat kinerja dan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Karakteristik LPD yang memiliki struktur organisasi relatif terbatas dan tingkat pengawasan eksternal yang minimal berpotensi menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis peran Sistem Pengendalian Internal sebagai mekanisme monitoring formal, Whistleblowing System sebagai mekanisme deteksi internal, serta Kesesuaian Kompensasi sebagai mekanisme penyalarsan insentif dalam pencegahan fraud pada LPD. Populasi penelitian adalah seluruh LPD yang masih aktif di Kabupaten Tabanan. Dan sampel sejumlah 150 LPD yang dipilih menggunakan rumus slovin dan selanjutnya, pembagian sampel pada tiap kecamatan dilakukan dengan teknik proportional sampling. Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antar variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal ($\beta = 0,015$; $p < 0,05$), Whistleblowing System ($\beta = 0,845$; $p < 0,05$), dan Kesesuaian Kompensasi ($\beta = 0,170$; $p < 0,05$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud. Nilai R^2 sebesar 0,989 menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan mampu menjelaskan 98,9% variasi Pencegahan Fraud. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan penyalarsan insentif dalam mendukung tata kelola LPD yang transparan dan berkelanjutan.*

Kata kunci: *Sistem Pengendalian Internal; Whistleblowing System; Kesesuaian Kompensasi; Pencegahan Fraud; Lembaga Perkreditan Desa.*

Abstract. *Fraud is a serious problem that can hamper the performance and sustainability of Village Credit Institutions (LPD). The characteristics of LPDs, which have a relatively limited organizational structure and minimal level of external supervision, have the potential to cause information asymmetry and conflicts of interest as explained in agency theory. Based on this framework, this study analyzes the role of the Internal Control System as a formal monitoring mechanism, the Whistleblowing System as an internal detection mechanism, and Compensation Suitability as an incentive alignment mechanism in preventing fraud in LPDs. The study population was all active LPDs in Tabanan Regency. A sample of 150 LPDs was selected using the Slovin formula and then, the sample was divided into each sub-district using a proportional sampling technique. The research data were analyzed using the Structural Equation Modeling approach based on Partial Least Squares (SEM-PLS) to test the relationship between the research variables. The results of the study indicate that the Internal Control System ($\beta = 0.015$; $p < 0.05$), Whistleblowing System ($\beta = 0.845$; $p < 0.05$), and Compensation Suitability ($\beta = 0.170$; $p < 0.05$) have a positive and significant effect on Fraud Prevention. The R^2 value of 0.989 indicates that the three variables simultaneously explain 98.9% of the variation in Fraud Prevention. This finding emphasizes the importance of strengthening oversight mechanisms and aligning incentives in supporting transparent and sustainable LPD governance.*

Keywords: *Internal Control System; Whistleblowing System; Compensation Suitability; Fraud Prevention; Village Credit Institutions.*

Pendahuluan

Setiap desa adat di Bali memiliki lembaga keuangan yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD, yang merupakan lembaga keuangan yang dikelola oleh komunitas Desa Adat di Bali, berlandaskan konsep Tri Hita Karana, terutama mengarah pada kegiatan keagamaan dan budaya sosial (Putra *et al.*, 2024). Menurut data yang diperoleh dari balisatudata (2024), jumlah LPD di Bali mencapai 1.404. Penduduk pedesaan tradisional Bali menjalankan *credit union* sendiri, yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Tujuan pembentukan LPD di setiap desa adat adalah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan dengan mendorong praktik menabung di antara penduduk setempat dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. Fenomena kebangkrutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Tabanan menjadi sorotan utama dalam keberlangsungan lembaga keuangan tradisional di Provinsi Bali. Berdasarkan data tahun 2024, dari total 311 LPD yang beroperasi di Kabupaten Tabanan, tercatat sebanyak 54 LPD mengalami kebangkrutan. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Bali, sehingga menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan, pengawasan, dan tata kelola lembaga tersebut.

Tingginya angka kebangkrutan ini tidak hanya mencerminkan kerentanan LPD terhadap risiko keuangan, tetapi juga menggambarkan lemahnya sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang seharusnya berfungsi sebagai benteng utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Berdasarkan data LPLPD Kabupaten Tabanan tahun 2024, Kabupaten Tabanan memiliki total 311 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang tersebar di sepuluh kecamatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 236 LPD dalam kondisi sehat, 21 LPD dalam kondisi tidak sehat, dan 54 LPD yang telah dinyatakan pailit atau bangkrut. Beberapa LPD di Tabanan terbukti mengalami penyimpangan pengelolaan keuangan yang signifikan, terutama dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, penggunaan dana lembaga untuk kepentingan

pribadi, serta pelanggaran prosedur kredit. Kasus korupsi di LPD Desa Adat Pacung, misalnya, menunjukkan kerugian lembaga sebesar sekitar Rp429,7 juta berdasarkan hasil audit dan dakwaan Kejaksaan Negeri Tabanan, yang berasal dari pengambilan dana kas dan transaksi pinjaman tanpa mekanisme pengendalian yang memadai. Selain itu, penyalahgunaan kewenangan di LPD Desa Adat Sunantaya, Kecamatan Penebel, yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, mengakibatkan kerugian lebih dari Rp1,16 miliar sebagaimana tercantum dalam hasil audit Inspektorat Kabupaten Tabanan. Temuan serupa juga terjadi pada beberapa LPD di Kecamatan Kerambitan, di mana audit BPKP Perwakilan Bali mengungkap kerugian lebih dari Rp1,03 miliar akibat penyimpangan pengelolaan dana usaha ekonomi produktif. Akumulasi kerugian finansial akibat kecurangan tersebut berdampak langsung pada penurunan likuiditas, melemahnya modal lembaga, serta terganggunya kepercayaan masyarakat, yang secara struktural merupakan faktor utama menuju kondisi gagal operasional dan kebangkrutan LPD. Kecurangan saat ini telah menjadi kebiasaan ketika terdapat kesempatan untuk melakukannya. Kesempatan akan memberi ruang kepada pelaku ketika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi (Utama & Astawa, 2022).

Berdasarkan teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), hubungan antara pengelola LPD (agen) dan masyarakat desa pekraman sebagai pemilik modal (prinsipal) sering kali menimbulkan potensi konflik kepentingan. Agen yang memiliki informasi lebih banyak dapat memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan. Kerangka *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh COSO (2013) menekankan bahwa pengendalian internal merupakan bagian dari sistem tata kelola yang mencakup lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan berkelanjutan. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengendalian internal maupun tata kelola organisasi, sebagian besar studi dilakukan pada entitas korporasi berskala besar dan sering kali menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan

mekanisme pemantauan formal (sistem pengendalian internal), mekanisme pelaporan internal (*whistleblowing system*), serta mekanisme penyalarsan insentif (kesesuaian kompensasi) secara simultan dalam lembaga keuangan mikro berbasis komunitas masih relatif terbatas. Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya kecurangan. SPI yang baik mampu mendeteksi dan mengurangi potensi penyimpangan dalam aktivitas operasional, serta menjaga integritas laporan keuangan (Putra *et al.*, 2024). Dalam perspektif teori agensi, konflik kepentingan antara principal dan agent muncul akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan (Jensen & Meckling, 1976). Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai mekanisme pemantauan formal yang dirancang untuk membatasi perilaku oportunistik agen melalui prosedur pengawasan, pemisahan fungsi, dan evaluasi kinerja. Kerangka pengendalian internal yang terstruktur, sebagaimana dijelaskan dalam *Internal Control-Integrated Framework* oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2013), menekankan pentingnya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, serta pemantauan berkelanjutan dalam memitigasi risiko penyimpangan.

Efektivitas pengendalian internal secara konseptual menurunkan peluang terjadinya kecurangan melalui pengurangan celah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas. Menurut Kuswati (2023), sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan menurut Dewi *et al.* (2023), Opaleye & Adelugba (2024), dan Lahu & Gayatri (2024), sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. *Sistem Pelaporan Whistleblowing* yang merupakan mekanisme pelaporan yang memberikan kesempatan bagi pegawai atau pihak terkait untuk melaporkan tindakan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran etika secara aman dan rahasia tanpa takut akan adanya tekanan atau balasan (*retaliasi*) (Utama & Astawa, 2022). *Sistem Pelaporan Whistleblowing* merupakan mekanisme deteksi internal yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara aman dan independen. Dalam kerangka agensi,

sistem ini berfungsi sebagai mekanisme disiplin tambahan yang mengurangi moral hazard karena agen menyadari adanya kemungkinan pengungkapan tindakan oportunistik. Konsep ini sejalan dengan pandangan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2022) yang menegaskan bahwa saluran pelaporan internal merupakan salah satu metode paling efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan sejak dini. Dengan meningkatkan probabilitas terdeteksinya penyimpangan, *sistem pelaporan whistleblowing* memperkuat struktur pengawasan organisasi. Menurut Kivaayatul Akhyaar *et al.* (2022) serta Lahu & Gayatri (2024), *sistem pelaporan whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan menurut Inawati & Sabila (2021), *sistem pelaporan whistleblowing* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Kesesuaian kompensasi merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya kecurangan karena berkaitan langsung dengan kepuasan dan motivasi kerja karyawan (Suprpta & Padnyawati, 2021). Teori agensi juga menekankan pentingnya penyalarsan insentif untuk meminimalkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976).

Kesesuaian kompensasi berperan sebagai mekanisme bonding yang mendorong agen bertindak selaras dengan tujuan principal. Sistem remunerasi yang adil dan proporsional terhadap beban kerja serta tanggung jawab dapat menurunkan dorongan perilaku oportunistik. Secara konseptual, desain insentif yang tepat meningkatkan motivasi intrinsik dan komitmen organisasi, sehingga mengurangi kecenderungan individu melakukan kecurangan sebagai bentuk kompensasi atas ketidakpuasan ekonomi. Menurut Silitonga *et al.* (2020), Sukadiputra & Hasibuan (2025), dan Permata & Ramashar (2024), kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan menurut Suprpta & Padnyawati (2021), kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Kabupaten Tabanan karena ditemukannya fenomena tingginya tingkat kecurangan yang terjadi di Kabupaten Tabanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada

objek penelitian, tahun penelitian, dan tempat penelitian. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, terdapat inkonsistensi hasil yang dikemukakan antara peneliti satu dengan peneliti lainnya dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan LPD di Tabanan. Berdasarkan fenomena dan gap penelitian sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) H1: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
- 2) H2: *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.
- 3) H3: Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif di mana sumber data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono (2025), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dapat diperoleh menggunakan metode survei melalui penyerahan kuesioner dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan yang terdapat pernyataan di dalamnya yang diisi oleh responden. Penelitian ini menggunakan satu responden kunci (*key informant*) per LPD, yaitu pimpinan atau pengelola utama yang pada umumnya menjabat sebagai ketua. Pemilihan satu responden dilakukan karena struktur organisasi LPD relatif kecil dan terpusat, sehingga ketua memiliki pemahaman paling menyeluruh mengenai sistem pengendalian internal, kebijakan kompensasi, dan mekanisme *whistleblowing* yang diterapkan secara kelembagaan. Untuk meminimalkan potensi bias, kuesioner difokuskan pada penilaian terhadap sistem dan kebijakan organisasi, bukan pada perilaku individu, serta diisi secara anonim tanpa mencantumkan identitas responden maupun LPD.

Selain itu, instrumen penelitian diadaptasi dari studi sebelumnya dengan pernyataan netral guna menekan *social desirability bias*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh LPD yang masih aktif di Kabupaten Tabanan, sejumlah 236 LPD. Alasan pemilihan tempat penelitian ini adalah karena LPD yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan LPD dengan tingkat kecurangan tertinggi di Bali. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *proportional sampling* dan untuk menentukan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengambilan sampel menggunakan *proportional sampling* digunakan untuk menjamin keterwakilan setiap kecamatan di Kabupaten Tabanan. Jumlah sampel pada masing-masing kecamatan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah LPD aktif di wilayah tersebut dibandingkan dengan total populasi, sehingga distribusi responden mencerminkan struktur populasi secara lebih akurat. Validitas konten kuesioner dijaga melalui adaptasi indikator dari penelitian terdahulu yang relevan, dengan penyesuaian redaksi sesuai operasional LPD tanpa mengubah substansi konstruk. Sebelum penyebaran secara luas, dilakukan uji coba terbatas (*pilot test*) untuk memastikan kejelasan dan relevansi setiap item pertanyaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan SEM-PLS yang sesuai untuk karakteristik data dan ukuran sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis yang meniadakan berbagai asumsi *Ordinary Least Square* (OLS) regresi. PLS dapat digunakan untuk memberikan penanda apakah variabel laten memiliki hubungan. SEM-PLS berupaya menyelidiki apakah ada hubungan atau dampak antara konstruk dengan menguji hubungan yang diprediksi di antara mereka.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebanyak 150 responden telah memberikan responnya dalam menjawab pernyataan-pernyataan yang terdapat di kuesioner penelitian. Berikut disajikan deskripsi karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Usia		
Di bawah 30 tahun	38	25,3%
31 – 40 tahun	55	36,7%
Di atas 40 tahun	57	38,0%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	127	84,7%
Perempuan	23	15,3%
Pendidikan		
SMA	24	16,0%
Diploma	11	7,3%
S1	75	50,0%
S2	40	26,7%
Jabatan		
Ketua	130	86,7%
Wakil	6	4,0%
Sekretaris	5	3,3%
Bendahara	5	3,3%
Anggota	4	2,7%

Mayoritas usia responden dalam penelitian ini adalah berkisar di atas 40 tahun, yang berjumlah 57 responden atau 38%. Mayoritas responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki, yang berjumlah 127 responden atau 84,7%. Mayoritas pendidikan responden adalah S1 sebanyak 50% atau 75 responden. Dan mayoritas jabatan responden adalah ketua sebanyak 130 responden atau 86,7%. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian:

1) Sistem Pengendalian Internal (X1)

Pernyataan mengenai sistem pengendalian internal yang dijawab oleh 150 responden dapat dijelaskan bahwa dari enam (6) indikator, terdapat dua (2) indikator yang dinilai sangat tinggi oleh responden dan empat (4) indikator dinilai tinggi oleh responden.

2) Whistleblowing System (X2)

Pernyataan mengenai *Whistleblowing System* yang dijawab oleh 150 responden dapat dijelaskan bahwa dari tujuh (7) indikator, terdapat tiga (3) indikator yang dinilai tinggi oleh responden dan empat (4) indikator dinilai cukup oleh responden.

3) Kesesuaian Kompensasi (X3)

Pernyataan mengenai kesesuaian kompensasi yang dijawab oleh 150 responden dapat dijelaskan bahwa dari

delapan (8) indikator, semuanya dinilai tinggi oleh responden.

4) Pencegahan Kecurangan (Y)

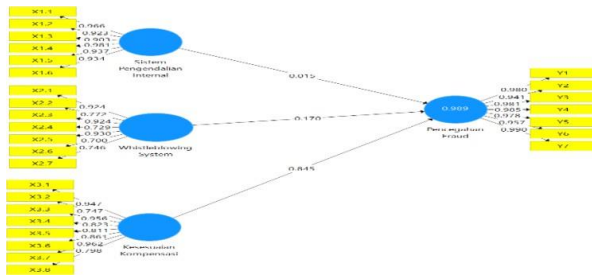
Pernyataan mengenai pencegahan kecurangan yang dijawab oleh 150 responden dapat dijelaskan bahwa dari tujuh (7) indikator, terdapat dua (2) indikator yang dinilai cukup tinggi oleh responden, empat (4) indikator dinilai tinggi oleh responden, dan satu (1) indikator dinilai cukup oleh responden.

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

Sehubungan dengan indikator-indikator yang membentuk variabel laten dalam penelitian ini bersifat refleksif, maka evaluasi model pengukuran (*measurement model/ outer model*) untuk mengukur validitas dan reliabilitas indikator-indikator tersebut adalah *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *Cronbach's alpha*.

Convergent Validity

Suatu kriteria dalam pengukuran validitas indikator yang bersifat refleksif. Evaluasi ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap koefisien outer loading masing-masing indikator terhadap variabel latennya. Suatu indikator dikatakan valid jika koefisien *outer loading* di atas 0,60.



Gambar 1. Model Struktural

Hasil perhitungan mengenai nilai outer loading pada Gambar 1 menunjukkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat valid berdasarkan kriteria *convergent validity*, yaitu nilai outer loading di atas 0,60.

Discriminant Validity

Pengukuran validitas indikator-indikator yang membentuk variabel laten dapat pula dilakukan melalui *discriminant validity*. *Discriminant validity* dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien Akar AVE (\sqrt{AVE} atau *Square root Average Variance Extracted*) setiap variabel dengan nilai korelasi antar variabel dalam model. Suatu variabel dikatakan valid jika akar AVE (\sqrt{AVE} atau *Square root Average Variance Extracted*) masing-masing konstruk lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk (Ghozali, 2021), dan masing-masing nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Tabel 2. Discriminant Validity

Variabel	AVE	\sqrt{AVE}	Sistem Pengendalian Internal (X1)	Whistleblowing System (X2)	Kesesuaian Kompensasi (X3)
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,867	0,931			
Whistleblowing System (X2)	0,865	0,997	0,930		
Kesesuaian Kompensasi (X3)	0,868	0,996	0,994	0,932	
Pencegahan Fraud (Y)	0,884	0,994	0,995	0,996	0,940

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai AVE untuk seluruh konstruk telah melebihi ambang batas 0,50. Selain itu, nilai akar kuadrat AVE (\sqrt{AVE}) untuk masing-masing konstruk memiliki rentang antara 0,931 hingga 0,997, di mana nilai tersebut secara umum lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Dengan demikian, model penelitian ini telah memenuhi syarat validitas yang ditetapkan

berdasarkan kriteria *discriminant validity*. Suatu pengukuran dapat dikatakan reliabel apabila *composite reliability* dan *Cronbach's alpha* memiliki nilai lebih besar dari 0,60. *Composite reliability* dan *Cronbach's alpha* merupakan pengukuran reliabilitas antar blok indikator dalam model penelitian.

Tabel 3. Discriminant Validity

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Sistem Pengendalian Internal (X1)	0,951	0,960
Whistleblowing System (X2)	0,991	0,992
Kesesuaian Kompensasi (X3)	0,980	0,979
Pencegahan Fraud (Y)	0,928	0,936

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* masing-masing konstruk telah menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60, sehingga memenuhi syarat reliabilitas berdasarkan kriteria *composite reliability*.

Evaluasi Model Struktural (*Structural Model/Inner Model*)

Evaluasi model struktural (*Structural Model/Inner Model*) adalah pengukuran untuk mengevaluasi tingkat ketepatan model dalam penelitian secara keseluruhan, yang dibentuk melalui beberapa variabel beserta indikator-indikatornya. Dalam evaluasi model struktural ini akan dilakukan melalui beberapa pendekatan, di antaranya:

- 1) R-Square (R^2)
- 2) f Square
- 3) Path Analysis

Evaluasi Model Struktural melalui R-Square (R^2)

R-Square (R^2) dapat menunjukkan kuat lemahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel dependen terhadap variabel independen. R-Square (R^2) juga dapat menunjukkan kuat lemahnya suatu model penelitian. Menurut Ghozali (2021), nilai R-Square (R^2) sebesar 0,67 tergolong model kuat, R-Square (R^2) sebesar 0,33 tergolong model moderat, dan R-Square (R^2) sebesar 0,19 tergolong model yang lemah.

Tabel 4. R-Square (R^2)

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Pencegahan Fraud	0,989	0,988

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai R Square untuk variabel dependen Pencegahan Fraud adalah sebesar 0,989, sedangkan nilai R Square Adjusted adalah sebesar 0,988. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel independen dalam model (Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Kesesuaian Kompensasi) secara simultan mampu menjelaskan varians dari variabel Pencegahan Fraud sebesar 98,9%. Sementara itu, sisanya sebesar 1,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai R Square yang sangat tinggi (0,989) dalam model penelitian ini juga perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya multikolinearitas antar variabel independen. Korelasi yang kuat antara Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*, dan Kesesuaian Kompensasi dapat memperbesar kemampuan model dalam menjelaskan varians variabel dependen, sehingga menghasilkan nilai R^2 yang mendekati satu. Kondisi ini dapat terjadi karena

ketiga variabel berada dalam satu kerangka tata kelola organisasi yang saling berkaitan dan secara empiris cenderung bergerak searah dalam konteks LPD. Dengan demikian, tingginya nilai R^2 tidak semata-mata menunjukkan model yang sempurna, tetapi juga dapat mencerminkan adanya keterkaitan konseptual dan empiris yang kuat antar konstruk.

Evaluasi Model Struktural melalui F-Square

Nilai F square model digunakan untuk mengetahui besarnya effect size variabel dependen terhadap variabel independen. Apabila nilai F square sama dengan 0,35, maka dapat diinterpretasikan bahwa prediktor variabel laten memiliki pengaruh besar; apabila bernilai sama dengan 0,15, maka memiliki pengaruh menengah; dan apabila bernilai sama dengan 0,02, maka memiliki pengaruh kecil (Ghozali, 2021).

Tabel 5. F-Square (F^2)

Variabel	Pencegahan Fraud
Sistem pengendalian Internal (X1)	0,018
Whistleblowing System (X2)	0,692
Kesesuaian Kompensasi (X3)	17,064

Sumber: Data diolah 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel Kesesuaian Kompensasi memiliki nilai f^2 sebesar 17,064, yang berarti variabel ini memiliki pengaruh tingkat besar terhadap Pencegahan Fraud. Selanjutnya, variabel *Whistleblowing System* memiliki nilai f^2 sebesar 0,692, sehingga dikategorikan memiliki pengaruh tingkat besar terhadap Pencegahan Fraud. Sementara itu, variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai f^2 sebesar 0,018, yang berada di bawah ambang batas 0,02, sehingga dikategorikan memiliki pengaruh yang kecil secara substansial terhadap Pencegahan Fraud. Besarnya nilai f^2 dalam penelitian ini mencerminkan peran dominan Kesesuaian Kompensasi dalam menjelaskan Pencegahan Fraud, yang tidak terlepas dari karakteristik Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan struktur organisasi yang relatif

sederhana dan tingkat keterlibatan pegawai yang tinggi dalam aktivitas keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan persepsi terhadap Kesesuaian Kompensasi berimplikasi langsung pada perilaku, kepatuhan, dan integritas individu. Selain itu, konsistensi persepsi responden terhadap Kesesuaian Kompensasi dan Pencegahan Fraud memperkuat hubungan antarvariabel, sehingga kontribusi Kesesuaian Kompensasi terhadap peningkatan koefisien determinasi menjadi sangat signifikan.

Path Analysis & Pengujian Hipotesis

Path Analysis & Pengujian Hipotesis yang diharapkan adalah H_0 ditolak atau nilai signifikansi (sig) < 0,05 (atau nilai t statistic > 1,96 dengan level of significance 0,05).

Tabel 6. Path Analysis & Pengujian Hipotesis

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics (O/STD EV)	P Values	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal -> Pencegahan Fraud	0,015	2.000	0.000	Signifikan
Whistleblowing System -> Pencegahan Fraud	0,845	7.730	0.046	Signifikan
Kesesuaian Kompensasi -> Pencegahan Fraud	0,170	44.404	0.000	Signifikan

Hasil analisis Tabel 6 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, meskipun dengan nilai koefisien yang paling kecil dibandingkan variabel lainnya. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik sistem pengendalian internal pada LPD yang bersifat formal, wajib, dan relatif seragam antar lembaga, sehingga variasinya terbatas dalam menjelaskan perbedaan tingkat pencegahan fraud. Selanjutnya, Whistleblowing System juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, dengan nilai koefisien yang sangat tinggi. Besarnya koefisien mencerminkan kuatnya hubungan langsung antara keberadaan saluran pelaporan yang dipercaya dengan peningkatan probabilitas deteksi dini dan efek pencegahan terhadap potensi pelaku fraud. Sementara itu, Kesesuaian Kompensasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud, meskipun dengan nilai koefisien yang

moderat. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi bukan faktor dominan secara langsung, namun tetap memiliki peran substantif dalam membentuk perilaku pengelola. Tingginya nilai T-Statistics dapat dijelaskan oleh homogenitas persepsi responden terhadap kebijakan kompensasi pada LPD.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada LPD di Kabupaten Tabanan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuswati (2023), yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik agen. Dengan adanya prosedur yang jelas dan pemisahan fungsi dalam pengelolaan keuangan, LPD dapat menekan potensi terjadinya kecurangan. Selain itu, Whistleblowing System juga terbukti memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud, dengan kontribusi yang lebih kuat dibandingkan mekanisme lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan Kivaayatul Akhyaar *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa saluran pelaporan yang aman dan kredibel meningkatkan transparansi serta kontrol internal. Dalam konteks LPD yang berbasis komunitas, whistleblowing system berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendeteksi penyimpangan dan memperkecil ruang moral hazard. Selanjutnya, Kesesuaian Kompensasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud, yang menunjukkan pentingnya mekanisme penyalarsan insentif dalam teori agensi. Penelitian oleh Silitonga *et al.* (2020) mendukung temuan ini, di mana struktur kompensasi yang adil dan proporsional dapat menyalarskan kepentingan agen dengan tujuan organisasi, sehingga mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan oportunistik. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan mekanisme pengendalian internal, pelaporan pelanggaran, dan kesesuaian kompensasi merupakan langkah strategis dalam mencegah fraud pada LPD di Kabupaten Tabanan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada LPD di Kabupaten Tabanan. Dalam perspektif teori agensi, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme monitoring formal yang dirancang untuk mengurangi asimetri informasi serta membatasi perilaku oportunistik agen. Keberadaan prosedur yang jelas, pemisahan fungsi, dan pengawasan berkelanjutan mampu menekan biaya agensi yang timbul akibat konflik kepentingan antara principal dan agent. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa pengawasan struktural merupakan fondasi tata kelola yang efektif. Di sisi lain, Whistleblowing System juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, bahkan dengan kontribusi yang lebih kuat dibandingkan mekanisme lainnya. Dalam kerangka teori

agensi, sistem pelaporan pelanggaran memperluas fungsi monitoring dengan meningkatkan probabilitas deteksi dan memperkecil ruang moral hazard. Saluran pelaporan yang aman dan kredibel mendorong transparansi serta memperkuat kontrol internal melalui partisipasi anggota organisasi. Kesesuaian Kompensasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, yang menunjukkan pentingnya mekanisme penyalarsan insentif dalam teori agensi. Struktur kompensasi yang adil dan proporsional menyalarskan kepentingan agen dengan tujuan organisasi, sehingga pencegahan fraud tidak hanya bergantung pada kontrol dan pengawasan, tetapi juga pada desain insentif yang tepat. Oleh karena itu, disarankan agar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Tabanan tidak hanya mempertahankan, tetapi juga terus meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal, khususnya dalam penetapan batas toleransi risiko, serta penguatan fungsi pemantauan dan pengawasan pada setiap aktivitas operasional. Optimalisasi Whistleblowing System perlu difokuskan pada pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan pengaduan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor.

Selain itu, kesesuaian kompensasi perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam perumusan dan pemberian tunjangan yang adil, transparan, dan proporsional dengan tanggung jawab serta kinerja pengelola. Peningkatan kualitas pengendalian internal, penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran, serta penerapan kebijakan kompensasi yang selaras diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan operasional LPD dalam jangka panjang. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi pencegahan fraud, seperti budaya organisasi, etika kerja, atau penerapan good corporate governance, serta memperluas populasi dan wilayah penelitian agar tingkat generalisasi hasil penelitian menjadi lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Report to the nations on occupational fraud and abuse: 2022 global fraud study*. ACFE.
- BaliProv. (2025). *Satu Data Indonesia Provinsi Bali*.
- COSO. (2013). *Internal control—Integrated framework*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Ghozali, I. (2021). *Structural equation modelling, metode alternatif dengan partial least square (PLS)* (Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2023). *Structural equation modelling, metode alternatif dengan partial least square (PLS)* (Edisi 4). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan fraud: Pengaruh whistleblowing system, government governance dan kompetensi aparatur pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731.
<https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kivaayatul Akhyaar, Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217.
<https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>.
- Lahu, D. A., & Gayatri. (2024). The influence of apparatus competence, individual morality, internal control system, whistleblowing system on [fraud prevention]. *International Journal of Economics, Accounting, and Management*, 1(2), 76–83.
- Opaleye, M. A., & Adelugba, I. A. (2024). The effect of the internal control system (ICS) on fraud prevention and the financial performance of selected retail supermarkets in Ibadan. *International Journal of Business and Management*, 3(1), 22–40.
- Permata, N., & Ramashar, W. (2024). The effect of compensation suitability, internal control, accounting information systems, and management morality on fraud prevention (study on Fox Hotel Pekanbaru City). *Journal of Applied Accounting and Finance*, 8(2), 139–151.
- Putra, I. K. B. D. R., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2024). Pengaruh good corporate governance, whistleblowing system dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam lembaga perkreditan desa. 305–313.
- Silitonga, Y., Nurbaiti, A., & Aminah, W. (2020). Pengaruh peran audit internal, pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan kecurangan (fraud) (Studi kasus pada Koperasi Karya Murni Medan). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 5941–5946.
- Sugiyono. (2025). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukadiputra, I. K. E., & Hasibuan, H. T. (2025). The effect of good corporate governance, the role of internal control, and compensation alignment on fraud prevention. *International Journal of Economic Literature*, 2(11), 1886–1903.
- Suprpta, E. L., & Padnyawati, K. D. (2021). Pengaruh pengendalian intern kas, financial pressure, kesesuaian kompensasi, dan moralitas individu terhadap kecurangan (fraud) pada LPD di

Kecamatan Tampaksiring Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 144–166.
<https://doi.org/10.32795/hak.v2i1.1495>.

Utama, K. D. S., & Astawa, I. G. P. B. (2022). Pengaruh whistleblowing system, kompetensi, good corporate governance, dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 56–67.
<https://doi.org/10.23887/vjra.v10i01.56315>.